

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Buku Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Tesis Program Study Magister Hukum (S2) Ilmu Hukum*, Jakarta : Bhayangkra ,2013.
- Andi HAMzah , *Hukum Pidana Indonesia* ,Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- Andi Hamzah , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* , Jakarta : Rieneka Cipta , 2006
- Andi hamzah, *Aspek-aspek Pidana Dalam Kegiatan Ekspor Impor(Dalam Kaitannya Dengan Inpres Np.4 tahun 1985)*, Rineka Cipta, Jakarta ,2009
- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* , Jakarta : Bayu Media ,2006
- Amir M.S . *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya* , Penerbit PT. Pustaka Binaman Pressindo ,cetakkan ke enam , Jakarta;1999
- Baharudin Lopa , *Tindak Pidana Ekonomi , Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan* , Jakarta ; Pradnya Paramita, 1992
- Bambang Poernomo , *Asas-asas Hukum Pidana* , Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998
- Bambang Waluyo , *Pidana dan Pemidanaan* , Jakarta : Sinar Grafika , 2008

Barda Nawawi Arief . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* , Jakarta : Kencana Pranada Media , 2010

Barda Nawawi Arief , *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi* (Bahan Bacaan Kapita Selekta Hukum Pidana) Progam S2 (Magister) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro,1999

Barda Nawawi Arief , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* , Bandung ,PT Citra Aditya Bakti ,2002

Barda Nawawi Arif ,*Perbandingan Hukum Pidana* , cet .2. Jakarta :Rajawali Press,1994

Boy Nurdin , *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia* (Bandung : P.T.Alumni .2012)

Boy Nurdin , *Thinking Paradigm Of Judges For Law Enforcement ;From Positivism to Realism* (Annual International Confrence Law,Regulation and Public Policy .GSTF 2017).

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni 1991

CST. Kansil , *Kamus Istilah Aneka Hukum* , Jakarta : Pustaka Sinar Harapan ,2001

Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* ,Yogyakarta,Liberty 1987

Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung, CV Utomo, 2004

Hatrick, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996

Haula Adof, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT, Raja Grafindo Persada Jakarta ;2005

Head W, John. *Pengantar Umum Hukum ekonomi* , (Program Kerja sama antara Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Jakarta;1997

Lederman ,Eli, *Criminal Law , Perpetrator and Corporation : Rethinking a Complex Triangle* (Washington : J.Crim L. & Criminology, 1985

Loqman ,Loebby, *Delik Politik di Indonesia* , IND-HILL CO,1993

Moeljatno , *Asas-asas Hukum Pidana* , Jakarta : Rieneka Cipta, 2002

Moeljatno , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* , Jakarta : Bina Askara, 1994

Muladi, Dwidja Priyanto, *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana* , Bandung , Sekolah Tinggi Hukum . 1991

Muladi , *Kapita Selekt Peradilan Pidana* , Cetakan II , Semarang ,Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002

Munir Fuady , *Penyelundupan Di Indonesia* , Bandung : Citra Aditya Bakti , 1998

- Platt ,Richard . *Smuggling in The British Isles A History*, Tempus
Published, 2007
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta
Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal* , Bogor : Poelitea ,
1994
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Bandung* , PT Citra Aditya Bakti,
2000
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan
Pertanggungjawaban Korporasi, Dalam Hukum Pidana*, Edisi
kedua Cetakan Pertama, Malang, Banyumedia Publishing 2003
- Soerjono Soekanto , *Penelitian Hukum Normatif* , Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada , 2003)
- Soufnir chibro , *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap
Pembangunan*, Jakarta Sinar Grafika , 1992
- Sudarto , *Kapita Selekta Hukum Pidana* ,Bandung ,PT Alumni, 1986
- Sumantoro , *Aspek-Aspek Pidana Bidang Ekonomi*, Jakarata Ghalia
Indonesia ,1990
- Sunarmo ,*Sistem dan Prosedur Kepabean Di Bidang Ekspor* (
Jakarta : 2007)
- Yudi Wibowo Sukinto , *Tindak Pidana Penyelundupan Di
Indonesia , Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana* (Jakarta :
Sinar Grafika , 2013)

Wangke Humphrey , *Kejahatan Transnasional dan Upaya Penanganannya*, Jakarta : Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi , Sekjen DPR RI

Zainuddin Ali , *Metode Penelitian Hukum* ,(Jakarta : Sinar Grafika , 2014)

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean

Penjelasan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabean

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan , Pasal 102

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Cukai

Undang-Undang Darurat Nomor 7/Drt/1955 Tentang Pengusutan dan Peradilan Tindakan Pidana Ekonomi Pasal 15

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 46

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Buku I , Pasal 103

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Darurat Nomor 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Pasal 26e RO berbunyi , “Tindak-tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 26b dianggap sebagai kejahatan”.

.Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan ,Pasal 102

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai ,pasal 50

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai ,pasal 50

C. Peraturan Pemerintah

Depertemen kehakiman RI ,*Laporan Detik-Detik Ekonomi dan Latar Belakang Permasalahannya* Jakarta, BPHN

Insruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985